

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2018



**INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
FEBRUARI 2018**

ISBN :
No. Publikasi : 82520.1808
Katalog BPS : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman : vii + 29

Naskah:
Seksi Statistik Kependudukan

Penyunting:
Seksi Statistik Kependudukan

Gambar Kulit:
Seksi Statistik Kependudukan

Diterbitkan oleh:
© BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

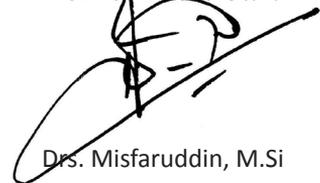
Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Februari 2018 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Februari 2018. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, Juli 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA	6
INDIKATOR PENGANGGURAN	15
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK	21

<https://malut.bps.go.id>

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2018

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Kemudian pada 2011-2014 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Mulai tahun 2015, Sakernas dikembalikan lagi menjadi format semesteran, yaitu pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II) dengan jumlah sampel nasional sebanyak 50.000 rumah tangga dan estimasi data sampai level provinsi. Pada pelaksanaan Sakernas Agustus terdapat penambahan sampel sebanyak 150.000 rumah tangga, sehingga total sampel Sakernas Agustus adalah 200.000 rumah tangga dengan estimasi data sampai level kabupaten/kota.

Jumlah sampel Sakernas Februari 2018 Provinsi Maluku Utara sebanyak 64 blok sensus (640 rumah tangga).

Sampel terpilih untuk Sakernas Februari 2018 di Provinsi Maluku Utara berjumlah 640 rumah tangga yang tersebar di 64 blok sensus. *Response Rate* pada Sakernas Februari 2018 sebesar 95,47 persen. Dengan jumlah sampel tersebut estimasi yang disajikan adalah level provinsi dengan tabel-tabel yang dirinci menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah.

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan informasi indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas Februari 2018 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

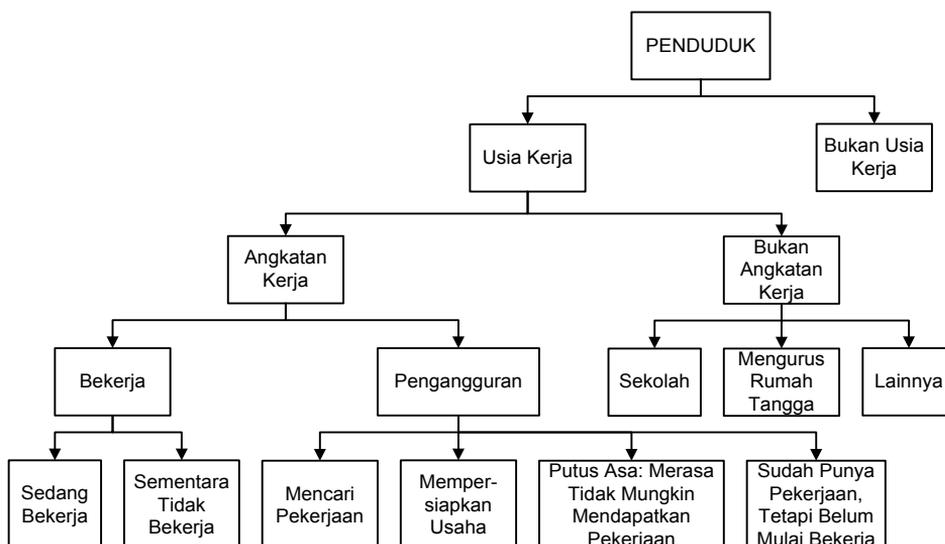
Pembahasan hasil Sakernas Februari 2018 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran dengan rincian menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada konsep *International Conference of Labor Statistics (ICLS) 13*.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran.

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Hal ini bertujuan untuk mengikuti standar internasional yang juga digunakan di negara lain. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambar 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN



Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 5 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah seminggu yang lalu yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PARTISIPASI DUNIA KERJA

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

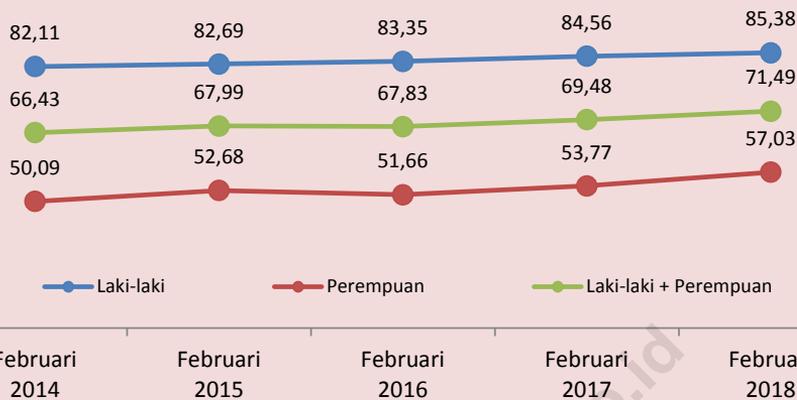
TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja disajikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah untuk memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin, Februari 2014-2018



Sumber : Sakernas Februari 2014-2018, Diolah

Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Februari 2018, TPAK Maluku Utara mencapai 71,49 persen, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya (69,48 persen). Angka tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 71 orang. Selebihnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pada Februari 2018, TPAK Maluku Utara mencapai 71,49 persen, yang berarti terdapat sekitar 71 dari 100 orang penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi

Secara umum, partisipasi penduduk perempuan dalam dunia kerja cenderung lebih rendah dibanding penduduk laki-laki. Hal ini juga terjadi di pasar tenaga kerja Maluku Utara. Terlihat dari nilai TPAK dalam lima tahun terakhir, di mana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di bawah 60 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa angkatan kerja di Maluku Utara banyak disumbang oleh penduduk laki-laki.

TPAK laki-laki pada Februari 2018 lebih besar dibanding TPAK perempuan. Pada Februari 2018 TPAK laki-laki sebesar 85,38 persen yang meningkat dibanding tahun sebelumnya (84,56 persen). Sementara itu, TPAK perempuan pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 53,77 persen pada Februari 2017 menjadi 57,03 persen pada Februari 2018.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	79,40	57,96	68,79
Perdesaan	87,89	56,63	72,64
Perkotaan + Perdesaan	85,38	57,03	71,49

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

Tabel 1 menyajikan keterangan tenaga kerja Maluku Utara berdasarkan klasifikasi wilayah. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan (68,79 persen) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perdesaan (72,64 persen). Hal ini menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Maluku Utara telah cukup merata, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Proporsi penduduk usia kerja yang mengisi pasar tenaga kerja di perkotaan hampir sama dibanding di perdesaan.

Selain itu, baik di perkotaan maupun di perdesaan, dominasi penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi di Maluku Utara sangat terlihat. TPAK penduduk laki-laki hampir dua kali dari TPAK penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan yaitu masing-masing sebesar 79,40 persen dan 87,89 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja di perkotaan sedikit lebih tinggi dibanding dengan perdesaan yaitu 57,96 persen dibanding 56,63 persen.

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2016-2018

Tingkat Pendidikan	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	36,71	42,93	41,92
SMP	16,67	17,71	16,17
SMA Umum	25,59	21,00	23,34
SMA Kejuruan	6,02	5,13	4,89
Diploma I/II/III	3,52	2,31	1,96
Universitas	11,49	10,92	11,72
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Sebanyak 41,92 persen angkatan kerja di Maluku Utara merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD, atau tidak pernah bersekolah. Persentasenya mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 42,93 persen. Meski demikian, kelompok penduduk ini masih menjadi penyumbang terbesar angkatan kerja di Maluku Utara.

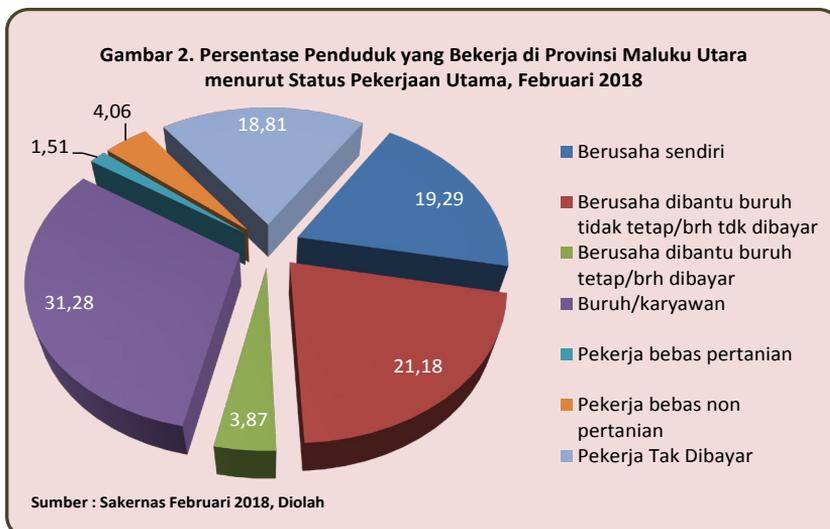
Sementara itu, kelompok penduduk dengan pendidikan SMA menyumbang angkatan kerja sebesar 23,34 persen, atau terbesar kedua. Nilai ini meningkat jika dibanding periode sebelumnya (Februari 2017) yang sebesar 21,00 persen. Kenaikan ini harus dilihat lebih rinci karena angkatan kerja bukan hanya penduduk yang bekerja, tapi juga terdapat pengangguran di dalamnya. Sebuah keuntungan jika kenaikan tersebut disumbang oleh penduduk yang bekerja. Akan tetapi, menjadi beban jika yang mengalami peningkatan adalah penduduk yang menganggur, seperti penduduk yang baru lulus sekolah tapi belum terserap di lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah.

PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

a. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan bisa menjadi indikator yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan majunya pembangunan di suatu daerah biasanya terlihat adanya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.



Status Pekerjaan Utama pada Sakernas diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

Sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan.

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2018, dari tujuh kategori status pekerjaan, tertinggi pertama adalah pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu 31,28 persen. Diikuti oleh penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,18 persen. Sementara, penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas tercatat masing-masing 1,51 persen di pertanian dan 4,06 persen di non pertanian.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2016-2018

Status Pekerjaan Utama	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	20,20	19,01	19,29
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	22,15	21,11	21,18
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	2,83	4,56	3,87
Buruh/karyawan	29,43	29,43	31,28
Pekerja bebas pertanian	1,53	1,76	1,51
Pekerja bebas non pertanian	2,37	2,25	4,06
Pekerja Tak Dibayar	21,49	21,88	18,81
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

Pada 2016-2018 penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan. Setelah stagnan pada kurun 2016-2017, pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan di Februari 2018. Sementara pekerja tak dibayar mengalami penurunan cukup besar. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi mulai bergesernya tenaga kerja tak berbayar menjadi tenaga kerja berbayar.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Bekerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	13,31	21,67	19,20	19,43	19,29
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	15,28	23,54	24,23	16,31	21,18
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	6,19	2,95	5,52	1,24	3,87
Buruh/karyawan	45,02	25,80	34,66	25,86	31,28
Pekerja bebas pertanian	0,20	2,03	2,29	0,24	1,51
Pekerja bebas non pertanian	6,09	3,25	6,12	0,76	4,06
Pekerja Tak Dibayar	13,91	20,77	7,98	36,16	18,81
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan hampir separuhnya berstatus buruh/karyawan yaitu mencapai 45,02 persen. Sementara kelompok penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas memiliki persentase terkecil dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Pekerja bebas di non pertanian tercatat sebesar 6,09 persen. Sedangkan pekerja bebas di pertanian persentasenya sangat rendah, yaitu hanya 0,20 persen.

Sementara itu, struktur penduduk yang bekerja di wilayah perdesaan menurut status bekerja cenderung merata dimana persentasenya tidak jauh berbeda antara penduduk yang berstatus berusaha sendiri (21,67 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (23,54 persen), dan buruh/karyawan/pegawai (25,80 persen). Hal lain yang cukup menarik adalah jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 20,77 persen. Angka tersebut dapat menjadi sebuah indikasi masih tingginya budaya kekeluargaan dalam bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan cukup banyak yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 34,66 persen pada laki-laki dan 25,86 persen pada perempuan. Meski demikian, sebagian besar penduduk perempuan yang bekerja adalah pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 36,16 persen.

b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Seiring perkembangan konsep dan jenis lapangan usaha, pengklasifikasian lapangan usaha yang digunakan oleh BPS saat ini mengacu pada KBLI 2015. Penyusunan KBLI 2015 merupakan penyempurnaan KBLI 2009 Cetakan III, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran struktur dan judul nomenklatur KBLI 2015 tidak mengubah tatacara dan makna klasifikasi.

Klasifikasi KBLI 2015 terdiri dari struktur pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi, sesuai prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi.

Dasar penyusunan KBLI 2015 adalah KBLI 2009 Cetakan III dan ISIC Rev.4 yang disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asian Manufacturing Statistics (EAMS) dan dikembangkan rinci sampai 5 (lima) digit untuk kegiatan yang spesifik di Indonesia.

Perubahan struktur berupa pergeseran atau pengelompokan suatu kegiatan dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, dan penambahan klasifikasi baru yang disebabkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk terbentuknya kelompok yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan kategori lain yang lebih sesuai. Oleh karena itu, klasifikasi lapangan usaha yang digunakan dalam publikasi ini adalah menurut KBLI 2015 dengan jumlah lapangan usaha sebanyak 17 kategori yang dirinci sebagai berikut:

- Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Kategori B Pertambangan dan Penggalian;
- Kategori C Industri Pengolahan;
- Kategori D Pengadaan Listrik dan Gas;

- Kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
- Kategori F Konstruksi;
- Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Kategori H Transportasi dan Pergudangan;
- Kategori I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Kategori J Informasi dan Komunikasi;
- Kategori K Jasa Keuangan dan Ausransi;
- Kategori L Real Estat;
- Kategori M,N Jasa Perusahaan;
- Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- Kategori P Jasa Pendidikan;
- Kategori Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- Kategori R,S,T,U Jasa Lainnya.

Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.



Selain kategori A, penduduk laki-laki banyak bekerja pada kategori O. Sedangkan penduduk perempuan banyak bekerja pada kategori C.

Kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan) adalah lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku Utara. Pada 2018, penduduk yang bekerja pada kategori ini tercatat sebesar 39,84 persen. Lapangan usaha terbesar kedua di Maluku Utara adalah kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan persentase sebesar 14,94 persen.

Menurut jenis kelamin, lapangan usaha terbesar baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja ada pada kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan), yaitu 34,89 persen pada penduduk laki-laki dan 42,94 persen pada penduduk perempuan. Perbedaan cukup signifikan terlihat pada lapangan usaha terbesar kedua. pada penduduk laki-laki, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar 10,41 persen. Sedangkan pada penduduk perempuan, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori G(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), yaitu mencapai 23,99 persen.

Tabel 5. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total (6)
	Kota (2)	Desa (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)	
A Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	12,05	50,92	42,94	34,89	39,84
B Pertambangan dan Penggalian	2,38	4,39	5,90	0,48	3,81
C Industri Pengolahan	9,01	8,36	6,39	11,99	8,54
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,12	0,23	0,36	0,28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,51	0,00	0,24	0,00	0,15
F Konstruksi	8,05	4,71	9,10	0,17	5,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	23,55	11,52	9,30	23,99	14,94
H Transportasi dan Pergudangan	7,17	3,55	7,34	0,18	4,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,50	1,33	1,38	3,60	2,24
J Informasi dan Komunikasi	1,42	0,10	0,44	0,53	0,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,65	0,35	0,37	0,55	0,44
L Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M,N Jasa Perusahaan	1,60	0,49	0,60	1,14	0,80
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,44	6,61	10,41	7,81	9,41
P Jasa Pendidikan	6,12	4,73	3,71	7,41	5,13
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	0,98	0,57	2,53	1,33
R,S,T,U Jasa Lainnya	3,67	1,84	1,09	4,39	2,36
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, penyerapan tenaga kerja di perdesaan masih didominasi oleh lapangan usaha pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), yaitu mencapai 50,92 persen atau mencapai setengah dari jumlah penduduk bekerja di daerah perdesaan. Diikuti oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) pada posisi terbesar kedua, yaitu sebesar 11,52 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di perkotaan paling besar disumbang oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), yaitu sebesar 23,55 persen. Kemudian diikuti kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar 16,44 persen.

c. Penduduk Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (*Full Time Worker*) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup maka termasuk pekerja paruh waktu (*Part Time Worker*).

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Status Pekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Februari 2016 - 2018

Status Pekerja	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	512,511	530,271	560,603
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	179,487	170,661	189,857
1. Setengah Penganggur	58,219	56,748	62,434
2. Pekerja Paruh Waktu	121,268	113,913	127,423
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	35.02	32.18	33.87
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	11.36	10.70	11.14
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	23.66	21.48	22.73

Sumber : Sakernas Februari 2016 - 2018, Diolah

Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara mengalami fluktuasi.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 35,02 persen pada 2016, turun menjadi 32,18 persen pada 2017 dan kembali meningkat menjadi 33,87 persen pada 2018. Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dibanding periode sebelumnya (Februari 2017), tingkat pekerja setengah penganggur maupun pekerja paruh waktu sama-sama mengalami kenaikan. Tingkat pekerja setengah penganggur semula sebesar 10,70 persen pada 2017 menjadi 11,14 persen pada Februari 2018. Sedangkan tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2017 sebesar 21,48 persen menjadi 22,73 persen pada Februari 2018.

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara Menurut Status Bekerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	159,742	400,861	345,061	215,542	560,603
Pekerja Tidak Penuh (<35 jam)	46,979	142,878	82,943	106,914	189,857
1. Setengah Penganggur	14,201	48,233	33,988	28,446	62,434
2. Pekerja Paruh Waktu	32,778	94,645	48,955	78,468	127,423
Tingkat Pekerja Tidak Penuh (<35 jam) (%)	29.41	35.64	24.04	49.60	33.87
1. Tingkat Pekerja Setengah Penganggur (%)	8.89	12.03	9.85	13.20	11.14
2. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	20.52	23.61	14.19	36.40	22.73

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja tidak penuh pada penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu sebesar 49,60 persen berbanding 24,04 persen. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan ini lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, ternyata tingkat pekerja tidak penuh di perdesaan (35,64 persen) lebih tinggi dibanding di perkotaan (29,41 persen).

d. Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai

dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal atau jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik dan pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Tabel 8. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2016-2018

Status Pekerja	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	37,50	44,47	43,21
SMP	17,25	17,72	16,71
SMA Umum	25,18	20,21	22,73
SMA Kejuruan	5,88	4,88	4,40
Diploma I/II/III	3,15	1,91	1,91
Universitas	11,04	10,82	11,03
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

Selama periode Februari 2016 sampai dengan Februari 2018, penduduk yang bekerja di Maluku Utara paling banyak berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Meningkat dari 37,50 persen pada Februari 2016 menjadi 44,47 persen di Februari 2017, kemudian turun menjadi 43,21 persen pada Februari 2018.

Tingkat pendidikan pekerja terbanyak kedua adalah SMA Umum. Dibanding periode sebelumnya (Februari 2017), pekerja dengan pendidikan SMA Umum mengalami peningkatan dari 20,21 persen pada 2017 menjadi 22,73 persen di 2018.

Penduduk yang bekerja di Maluku Utara didominasi penduduk berpendidikan dasar (SMP kebawah).

Secara umum, penduduk yang bekerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan dasar (SMP kebawah). Persentasenya mencapai 59,92 persen. Nilai ini menurun jika dibandingkan periode sebelumnya (Februari 2017) yang mencapai 62,19 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada kelompok penduduk berpendidikan menengah (SMA/SMK) yang mencapai 2,04 persen. Sedangkan pada kelompok penduduk berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya terjadi sedikit peningkatan, yaitu 0,21 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	23,85	50,93	40,69	47,26	43,21
SMP	18,94	15,83	17,47	15,50	16,71
SMA Umum	28,66	20,37	26,92	16,03	22,73
SMA Kejuruan	8,45	2,79	3,79	5,37	4,40
Diploma I/II/III	3,20	1,39	1,34	2,81	1,91
Universitas	16,90	8,70	9,79	13,03	11,03
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

Menurut daerah tempat tinggal, lebih dari setengah penduduk yang bekerja di wilayah desa berpendidikan SD ke bawah, yaitu mencapai 50,93 persen. Sementara di wilayah kota, kelompok terbesar penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMA Umum, yaitu sebesar 28,66 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan, masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 40,69 persen untuk laki-laki dan 47,26 persen untuk perempuan.

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

T i n g k a t Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/ mempersiapkan usaha.

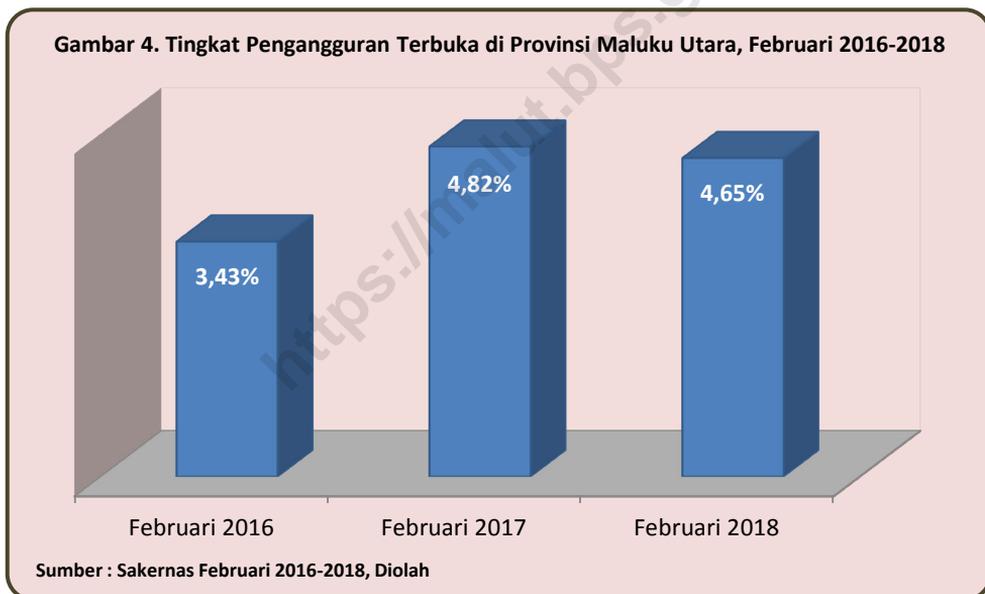
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status

sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara aktif atau tidak mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja dan indikasi kegagalan mencari pekerjaan.

Dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara, sekitar 5 orang diantaranya adalah penganggur.



Pada Februari 2018, TPT Maluku Utara adalah sebesar 4,65 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara terdapat sekitar 4-5 orang penganggur. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara berfluktuasi. Meningkat tajam dari 3,43 persen pada Februari 2016 menjadi 4,82 di Februari 2017, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,65 persen pada Februari 2018.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2016-2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari 2016	3,99	3,23	1,73	6,28	3,43
Februari 2017	6,81	3,98	3,90	6,33	4,82
Februari 2018	5,46	4,33	3,66	6,21	4,65

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

Menurut klasifikasi wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi daripada di pedesaan. Pada Februari 2018 TPT perkotaan adalah sebesar 5,46 persen, sedangkan TPT pedesaan sebesar 4,33 persen. Secara umum, tingkat pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi dari tingkat pengangguran di pedesaan.

Dibanding periode sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir tingkat pengangguran di perkotaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran di perkotaan yang tercatat sebesar 3,99 persen pada 2016 naik menjadi 6,81 persen pada 2017. Pada 2018, tingkat pengangguran perkotaan turun menjadi 5,46 persen. Keadaan yang berbeda terjadi di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di pedesaan terus meningkat dari 3,23 persen di 2016 menjadi 3,98 persen di 2017, dan kembali meningkat menjadi 4,33 persen pada Februari 2018.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada Februari 2018, tercatat tingkat pengangguran perempuan sebesar 6,21 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada penduduk laki-laki adalah 3,66 persen atau sekitar separuh dari tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan.

T i n g k a t pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK, yaitu sebesar 14,21 persen pada Februari 2018.

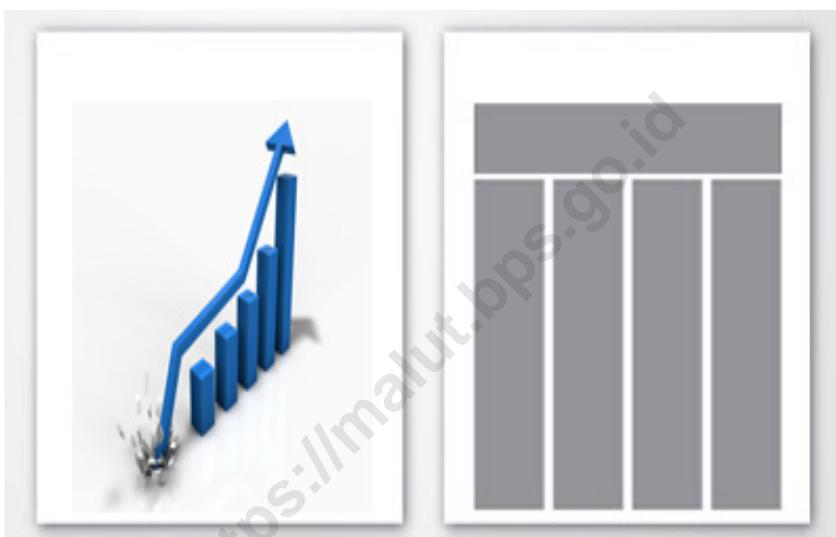
Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok lulusan SMK, yaitu sebesar 14,21 persen. Pada urutan kedua, tingkat pengangguran terbuka berada pada kelompok lulusan universitas, yaitu sebesar 10,23 persen. Tingkat pengangguran terbuka paling rendah berada pada kelompok lulusan SMP dan SD, yaitu sebesar 1,46 persen dan 1,70 persen.

Tabel 11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin, Februari 2018

Status Bekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	2,80	1,50	2,28	0,89	1,70
SMP	1,89	1,25	1,77	0,90	1,46
SMA Umum	8,14	6,56	6,21	9,54	7,14
SMA Kejuruan	-	26,78	4,47	23,07	14,21
Diploma I/II/III	5,45	9,08	-	12,33	7,38
Universitas	10,57	9,97	5,52	15,31	10,23
Maluku Utara	5,46	4,33	3,66	6,21	4,65

Sumber : Sakernas Februari 2018, Diolah

LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK



Tabel Lampiran 1. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2014-2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	108.769	110.717	112.722	114.502
Halmahera Tengah	48.414	49.807	51.315	52.813
Kepulauan Sula	93.435	95.285	97.177	99.196
Halmahera Selatan	215.791	219.836	223.460	227.280
Halmahera Utara	176.573	180.100	183.596	187.104
Halmahera Timur	82.914	85.188	87.680	90.070
Pulau Morotai	59.102	60.727	62.412	64.001
Pulau Taliabu	50.067	50.709	51.316	51.928
Ternate	207.789	212.997	218.028	223.111
Tidore Kepulauan	95.813	96.979	98.206	99.337
Maluku Utara	1.138.667	1.162.345	1.185.912	1.209.342

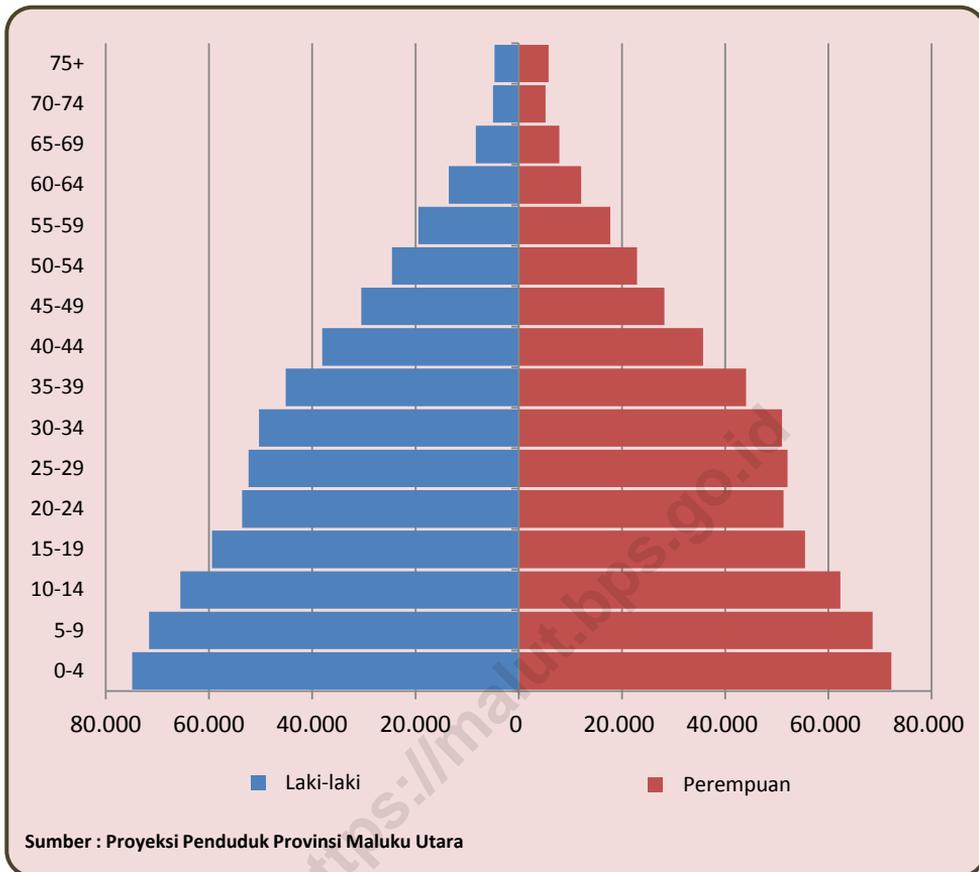
Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Tabel Lampiran 2. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	74.889	72.175	147.064
5-9	71.628	68.581	140.209
10-14	65.525	62.281	127.806
15-19	59.438	55.439	114.877
20-24	53.577	51.308	104.885
25-29	52.309	52.079	104.388
30-34	50.296	50.986	101.282
35-39	45.157	44.052	89.209
40-44	38.058	35.717	73.775
45-49	30.481	28.241	58.722
50-54	24.529	22.943	47.472
55-59	19.407	17.735	37.142
60-64	13.569	12.077	25.646
65-69	8.337	7.891	16.228
70-74	5.002	5.198	10.200
75+	4.656	5.781	10.437
Jumlah	616.858	592.484	1.209.342

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Gambar Lampiran 1. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara, 2017

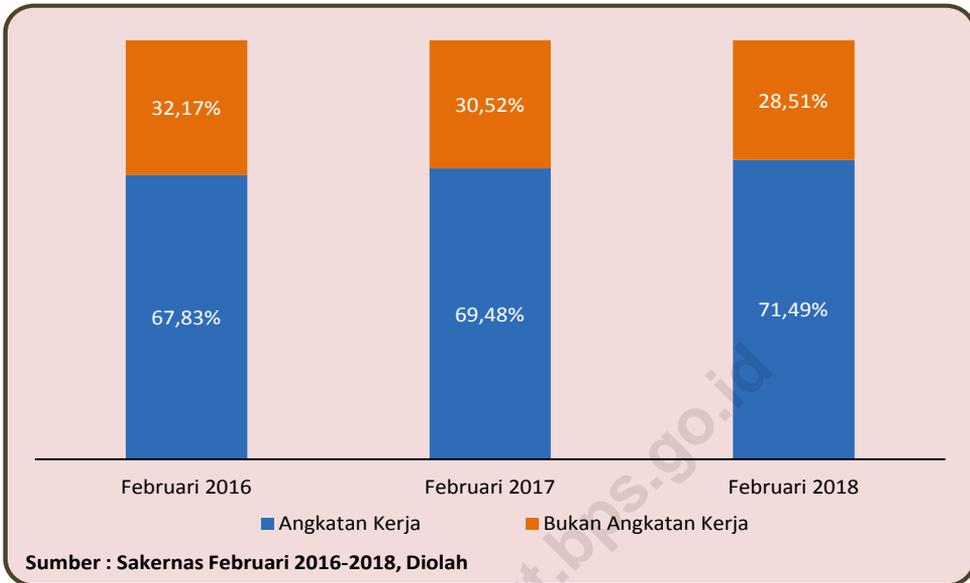


Tabel Lampiran 3. Penduduk Usia Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2016-2018

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	782 438	801 856	822 446
2. Angkatan Kerja	530 721	557 120	587 972
Bekerja	512 511	530 271	560 603
Penganggur	18 210	26 849	27 369
3. Bukan Angkatan Kerja	251 717	244 736	234 474
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,83	69,48	71,49
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,43	4,82	4,65
6. Pekerja Tidak Penuh	179 487	170 661	189 857
Setengah Penganggur	58 219	56 748	62 434
Paruh Waktu	121 268	113 913	127423

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

Gambar Lampiran 2. Persentase Penduduk Usia Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2016-2018



Tabel Lampiran 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja di Provinsi Maluku Utara menurut Lapangan Usaha Utama, Februari 2017-2018

Lapangan Usaha	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,14	39,84
B Pertambangan dan Penggalian	3,00	3,81
C Industri Pengolahan	6,90	8,54
D Pengadaan Listrik dan Gas	-	0,28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,15
F Konstruksi	6,02	5,66
G Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	13,12	14,94
H Transportasi dan Pergudangan	5,14	4,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	2,24
J Informasi dan Komunikasi	0,32	0,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,44
L Real Estat	-	-
M,N Jasa Perusahaan	0,45	0,80
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,27	9,41
P Jasa Pendidikan	5,59	5,13
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	1,33
R, S, T, U Jasa Lainnya	2,55	2,36
Total	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2017-2018, Diolah

Tabel Lampiran 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2016-2018

Tingkat Pendidikan	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,36	1,41	1,70
Sekolah Menengah Pertama	0,06	4,78	1,46
Sekolah Menengah Atas	4,97	8,41	7,14
Sekolah Menengah Kejuruan	5,55	9,31	14,21
Diploma I/II/III	13,72	21,58	7,38
Universitas	7,26	5,72	10,23
Total	3,43	4,82	4,65

Sumber : Sakernas Februari 2016-2018, Diolah

GLOSARIUM

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification* (ISIC).
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate - 97712

Telp : (0921) 3127878, Fax : (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id